

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DAN PENERAPAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

Wagiran
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta
wagiran@uny.ac.id

Dimuat dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 15 No. 2 Oktober 2006,
ISSN: 18929-5797, hal 192-211. Diterbitkan oleh Fakultas Teknik UNY

Abstrak

Globalisasi yang diikuti dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketatnya persaingan pasar kerja menuntut lembaga pendidikan termasuk pendidikan menengah kejuruan untuk benar-benar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam operasionalnya diperlukan biaya yang makin besar. Krisis ekonomi yang berakibat menurunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, diberlakukannya otonomi daerah serta penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan kejuruan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Lembaga pendidikan kejuruan harus lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengalokasikan berbagai sumberdaya dan sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan diterapkannya otonomi daerah serta MPMBS, belum terjadi perubahan mendasar orientasi pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan menengah kejuruan. Pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri masih mengandalkan dana dari pemerintah, sedangkan pada SMK Swasta masih sangat bergantung pada orangtua siswa. SMK belum mampu menggali dana secara maksimal dari masyarakat, dunia usaha/industri serta memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Dismasing itu, SMK dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha/industri, penerapan Production Based Education serta optimalisasi pengelolaan unit produksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

Kata kunci: Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Menengah Kejuruan, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat

menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya baik disadari maupun tidak disadari.

Biaya pendidikan dapat didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (*input*) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan (Abbas Ghazali, 2000b). Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola secara efektif, efisien agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini penting terutama dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah.

Pembahasan

Peran Pendidikan Kejuruan dalam Penyiapan Sumberdaya Manusia

Dimulainya AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan AFLA (*Asean Free Labour Area*) pada tahun 2003 sebagai salahsatu bentuk kesepakatan perdagangan bebas akan menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin terbuka antar negara. Tahapannya jelas bahwa pada tahun 2003, produk, jasa dan sumber daya manusia (SDM) kita harus mampu bersaing dengan produk, jasa dan SDM dari negara Asean. Pada tahun 2010 produk, jasa dan SDM kita harus mampu bersaing dengan produk, jasa dan SDM dari negara yang tergabung dalam APEC. Untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan tersebut dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang handal, khususnya angkatan kerja yang melek angka dan melek ilmu. Konsekuensi yang timbul adalah tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara. Jika tidak maka tenaga kerja Indonesia akan tersisihkan oleh tenaga kerja asing dan menjadi pecundang di negeri sendiri.

Dalam proses globalisasi juga akan terjadi alih teknologi yang memerlukan persiapan dalam bidang pendidikan, manajemen dan struktur produksi yang tepat. Dalam era tersebut dibutuhkan tenaga-tenaga terampil yang memiliki kemampuan adaptif dan budaya industri yaitu berfikir rasional, bekerja tepat waktu (disiplin), bekerja secara tersistem, sadar akan keterkaitan dengan mutu dan memiliki komitmen untuk bersaing secara sehat (Djauharis Rosul, 1997). Faktor utama yang menentukan keunggulan adalah

tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang layak diunggulkan. Artinya diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan professional sebagai andalan utama yang menentukan keunggulan.

Pendidikan sebagai pranata utama penyiapan sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam menentukan kualitas SDM. Pendidikan juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan SDM lebih mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu pada umumnya negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Dari sisi ekonomi, pendidikan bukan hanya semata-mata dipandang sebagai kegiatan konsumtif, namun diakui sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas. Bagi masyarakat secara umum pendidikan bermanfaat untuk teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. *The Human Capital Theory* menyatakan bahwa pendidikan menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai kepada manusia dan karenanya mereka dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktivitasnya. Hal ini memungkinkan mereka mengejar tingkat pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan masa depan mereka dengan meningkatkan penghasilan seumur hidupnya (Abbas Ghozali, 2000b). Karena manfaatnya tersebut sudah selayaknya apabila pendidikan menjadi perhatian utama suatu bangsa.

Beberapa studi yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan SDM terbukti telah memiliki sumbangan yang signifikan terhadap keuntungan ekonomi (Mc. Mahon dan Budiono, 1992). Temuan studi tersebut menyatakan bahwa keuntungan ekonomi (*rate of return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi yang menguntungkan baik dari segi sosial maupun ekonomis

Pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM khususnya tenaga kerja tingkat menengah. Hal ini didasarkan pada proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang yang memerlukan tenaga terampil tingkat menengah dalam jumlah yang besar. Pengalaman di lapangan maupun data proyeksi perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa ditinjau dari prospek kebutuhan maupun kelayakan ekonomisnya pendidikan kejuruan masih merupakan investasi yang cukup baik dalam mempersiapkan tenaga terampil tingkat menengah (Sukanto, 1998). Hasil analisis biaya-manfaat yang dilakukan Abbas Ghozali (2000a) menunjukkan bahwa secara keseluruhan investasi di sekolah lanjutan tingkat atas baik SMU maupun SMK adalah menguntungkan. Selain itu ditemukan bahwa investasi di SMK terutama SMK Teknologi adalah investasi yang paling menguntungkan.

Namun demikian dalam perjalanan seiring bergulirnya era global dan perkembangan iptek yang begitu cepat, pendidikan kejuruan dihadapkan pada berbagai permasalahan menyangkut kualitas lulusan yang dihasilkannya.. Dari dunia usaha muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik (Depdiknas, 2002).) Sistem pendidikan yang selama ini diterapkan dirasakan belum mampu menghasilkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di pasar bebas, serta kurang mendukung tuntutan dunia usaha dan industri akan kebutuhan tenaga kerja

Perubahan paradigma pendidikan dari *supply driven* ke *demand driven* menuntut lembaga pendidikan turut bertanggung jawab terhadap kualitas lulusan termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai pemasok tenaga kerja, namun dituntut menghasilkan lulusan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Oleh karena itu lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi sudah selayaknya selalu melakukan evaluasi terhadap lulusannya untuk mendapatkan umpan balik program pembelajarannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pendidikan menengah kejuruan dalam hal ini SMK, agar menghasilkan lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia kerja sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Upaya tersebut diantaranya dengan diterapkannya kebijakan *link and match*, pendidikan sistem ganda, pendidikan

berbasis kompetensi, *Broad-based Education*, maupun *Life Skill Education* yang kesemuanya bertujuan meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan kerja.

Tercapai tidaknya tujuan pendidikan di atas sangat tergantung dari mutu masukan dan sejumlah variabel dalam proses pendidikannya. Dalam operasionalnya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari faktor biaya. Disadari bahwa upaya meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan seiring tuntutan era global serta perkembangan iptek yang begitu cepat memerlukan pembiayaan yang makin besar. Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM, sudah selayaknya bila pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pembiayaan pendidikan termasuk pendidikan kejuruan

Tantangan dan Peluang Pembiayaan Pendidikan Kejuruan

Ditengah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, pendidikan kejuruan dihadapkan pada berbagai perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya turut serta berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan. Beberapa perubahan mendasar tersebut diantaranya: dampak buruk krisis ekonomi, diterapkannya otonomi daerah dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, masih menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Krisis ini ditandai dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa termasuk bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Pengadaan sarana pendidikan, jasa penataran dilaksanakan dengan harga satuan yang tinggi. Kenaikan harga tersebut telah menyebabkan nilai riil alokasi dana yang diterima dari APBN menurun dibanding dengan nilai tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, anggaran pendidikan kita memang termasuk kategori rendah. Selain itu bila dilihat dari sumber pembiayaan pendidikan sebagian besar sekolah (92,35%) masih mengandalkan biaya dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan besarnya biaya satuan pendidikan per siswa (*unit cost*) menjadi sangat rendah. Hasil studi yang dilakukan Dirjen PUOD menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD, SLTP maupun SLTA masih lebih kecil dari 10 %.

Dengan turunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tersebut, mau tidak mau sekolah dituntut mampu menggali dana pembiayaan pendidikan secara mandiri, serta mampu meningkatkan peran masyarakat/dunia usaha dalam pembiayaan pendidikan.

Diberlakukannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 th 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah dalam berbagai bidang agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi setiap daerah. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan kewenangannya kepada daerah. Dengan demikian manajemen pendidikan yang tadinya berada di pusat menjadi kewenangan daerah masing-masing. Sesuai dengan UU No 25 tahun 1999 (pasal 8), kewenangan daerah dalam berbagai bidang termasuk pendidikan ini akan diikuti dengan pelimpahan pembiayaannya kepada daerah. Akan menjadi permasalahan bagi daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas dan kemandirian yang rendah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerahpun sekolah dituntut punya kemandirian dalam menggali dana bagi peningkatan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki serta meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha bagi pembiayaan pendidikan.

Penerapan manajemen berbasis sekolah erat kaitannya dengan pelaksanaan UU No 25 tahun 1999 yaitu mengubah mekanisme pengambilan keputusan dan kewenangan yang selama ini dilakukan oleh pusat dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memungkinkan dilaksanakannya asas desentralisasi di bidang pendidikan untuk memperbaiki sistem sentralisasi yang kaku. Desentralisasi pendidikan memberi keleluasaan dan kewenangan pada sekolah dan masyarakat setempat untuk mengelola pendidikan.

MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah yang dimaksudkan agar sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan sumberdana, mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap

terhadap kebutuhan setempat. MBS memberi peluang kepada kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya.

Penerapan MBS akan berimplikasi pula pada pembiayaan pendidikan. Strategi implementasi MBS jangka panjang memberikan kewenangan dan keleluasaan secara mandiri kepada sekolah dalam mengelola maupun menggali dana pembiayaan pendidikan dengan kontrol komite sekolah. Jelas bahwa dengan diterapkannya MBS sekolah dituntut mampu secara mandiri dan kreatif untuk menggali dan mengelola sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.

Dari uraian di atas jelas bahwa dengan turunnya kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, penerapan otonomi daerah maupun manajemen berbasis sekolah semuanya menuntut sekolah untuk lebih mandiri, kreatif, inovatif dalam menggali dan mengalokasikan berbagai sumberdaya dan sumberdana bagi pembiayaan pendidikan. Sekolah diberi keleluasaan dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya untuk membiayai pendidikan yang memang mahal.

Bagi sekolah dengan budaya kemandirian dan profesionalisme yang tinggi perubahan paradigma pembiayaan pendidikan ini merupakan peluang untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumberdana bagi pembiayaan pendidikan guna peningkatan mutu. Namun bagi sekolah dengan kemandirian rendah dan terbiasa bergantung kepada pemerintah, perubahan paradigma pembiayaan ini merupakan masalah yang amat berat dan tidak jarang kebutuhan pembiayaan yang teramat tinggi ini semata-mata dibebankan kepada siswa tanpa usaha untuk menggali sumberdana lain.

Bagaimana sebenarnya sekolah menengah kejuruan (SMK) memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikannya, bagaimana sebenarnya SMK menyikapi perubahan paradigma pembiayaan tersebut, sudahkan SMK melakukan diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, upaya apa saja yang dilakukan SMK dalam menggali dan mengelola biaya pendidikannya. Bagaimana pula dengan SMK-SMK swasta yang *notabene* tidak pernah mendapat dana dari pemerintah seperti sekolah negeri dan sudah terbiasa dengan kemandirian dalam pembiayaan pendidikan. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan indikasi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian apakah pendidikan kejuruan mampu

memenuhi kebutuhan pembiayaannya dalam era otonomi daerah serta penerapan MPMBS.

Hasil-hasil Penelitian Pembiayaan Pendidikan

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di Indonesia, paling tidak terdapat tiga penelitian terakhir baik secara nasional maupun regional. Ketiga penelitian berikut hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Nanang Fatah (2000) tentang pembiayaan pendidikan khususnya di Sekolah Dasar Negeri di Jawa Barat menemukan gambaran bahwa sumber pembiayaan terbesar adalah dari pemerintah pusat sebesar 90,73 %, sedangkan dari orangtua siswa sebesar 6,88 % dan sumbangan terkecil berasal dari masyarakat sebesar 0,40 %. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran terbesar adalah untuk gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar 81,46 %, dan pengeluaran terkecil untuk pengelolaan sekolah sebesar 0,40 %.
2. Penelitian yang dilakukan Dedi Supriyadi (2003) tentang satuan biaya pendidikan dasar dan menengah Negeri dalam lingkup nasional menemukan kecenderungan yang sama bahwa sebagian besar pembiayaan pendidikan berasal pemerintah baik pusat maupun daerah serta orangtua siswa. Khusus untuk SMK Negeri sumberdana terbesar berasal dari pemerintah sebesar 78,9 %, diikuti dana dari orangtua siswa sebesar 16,9 %. Sedangkan kontribusi masyarakat dan sumber lainnya hanya mencapai 4,2 %. Pengeluaran terbesar adalah untuk gaji dan kesejahteraan karyawan.
3. HM. Sukardi dkk. (2004) dalam penelitiannya tentang pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa sumber pembiayaan terbesar untuk SMK Negeri berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), sedangkan untuk SMK berasal dari orangtua siswa. Sumbangan yang berasal dari masyarakat, dunia usaha dan industri serta pemanfaatan potensi melalui unit produksi baik untuk SMK Negeri maupun SMK Swasta secara umum belum menghasilkan sumbangan dana yang berarti. Di samping itu ditemukan juga bahwa semua SMK merasakan hambatan pembiayaan berupa keterlambatan siswa/orangtua dalam melunasi iurannya.

Implikasi

Dari ketiga penelitian tersebut tampak bahwa belum ada perubahan yang berarti dalam orientasi pembiayaan pendidikan. SMK negeri pada umumnya masih mengandalkan dana dari pemerintah sedangkan SMK Swasta pada umumnya sangat bergantung pada orangtua siswa. Ketiga penelitian tersebut juga menemukan hal yang sama yaitu dana yang berasal dari masyarakat, dunia usaha/industri dan unit produksi masih rendah. Hal ini mengindikasikan belum mampunya SMK dalam menggali sumberdana “alternatif” dari masyarakat, dunia usaha/industri serta pemanfaatan potensi yang dimiliki.

Disadari bahwa upaya untuk menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan biaya yang semakin tinggi. Di lain pihak pendidikan menengah kejuruan dalam hal ini SMK tidak bisa lagi mengandalkan dana dari pemerintah yang semakin turun kemampuannya serta dari orangtua siswa yang pada umumnya termasuk golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu mau tidak mau apabila ingin tetap berkembang SMK dituntut semakin mandiri, kreatif, inovatif untuk menggali dan memanfaatkan dana dari masyarakat, dunia usaha/industri dan memanfaatkan potensinya dalam berbagai bentuk.

Perlu pula dicermati analisis yang dikemukakan Dedi Supriyadi (2003: 185) berdasarkan hasil *research* skala nasional di SMK Negeri yang menyatakan bahwa:

“Seandainya seluruh anggaran untuk gaji yang tercantum dalam RAPBS SMK Negeri berasal dari pemerintah, maka sebanyak 99,5 % dana pemerintah yang disalurkan ke sekolah untuk pembayaran gaji. Hal ini berarti kurang dari 1 % dana dari pemerintah yang diterima SMK Negeri diperuntukkan bagi penyelenggaraan KBM. Jelas bahwa upaya peningkatan mutu dan relevansi SMK tidak dapat menggantungkan diri dari dana pemerintah. Hal ini menuntut sekolah untuk aktif mencari sumberdana selain dari pemerintah.”

Beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidikan menengah kejuruan dalam hal ini SMK adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya untuk menggali dana selain dari orangtua siswa. *Production Based Education* merupakan salah satu pola yang dapat diterapkan. Dalam model ini sekolah dituntut mampu mencari pasar dan menghasilkan suatu produk atau jasa untuk dijual kepada masyarakat luas. Order yang diterima merupakan bahan praktek untuk siswa dengan memperhatikan

kompetensi yang harus dicapai. Dengan demikian hasil praktek dari siswa harus merupakan barang atau jasa yang layak jual. Hasil penjualan ini kemudian digunakan untuk membiayai praktek selanjutnya serta pembiayaan proses pembelajaran pada umumnya. Dengan pola ini sekolah dapat pula bekerjasama dengan industri untuk memenuhi kebutuhan industri bersangkutan.

Temuan yang cukup menggembirakan dari penelitian yang dilakukan Sukardi (2004) adalah hampir semua SMK Negeri dan Swasta telah memiliki unit produksi. Namun demikian semua SMK menyatakan bahwa sumbangan dari unit produksi masih sangat kecil. Potensi tersebut merupakan asset yang berharga dan layak untuk dikembangkan. Sudah saatnya unit produksi dikelola secara profesional dengan memperhatikan aspek-aspek bisnis. Optimalisasi unit produksi ini dapat dilakukan dengan memperbaiki pola manajemen, perluasan pasar, serta peningkatan kualitas sumberdaya pengelola. Harapannya dengan optimalisasi unit produksi tersebut akan semakin meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Di samping upaya-upaya tersebut, upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan menggali dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat termasuk dunia usaha dan industri dalam aspek yang beragam. Dengan kerjasama intensif tersebut harapannya akan didapatkan hubungan timbal balik yang menguntungkan di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini SMK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat mampu berkontribusi secara maksimal terhadap masyarakat, di lain pihak masyarakat termasuk dunia usaha dan industri juga berperan dalam memajukan pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan.

Pada akhirnya upaya-upaya diversifikasi dan intensifikasi sumberdana tersebut harus diimbangi dengan efisiensi dalam pemanfaatannya baik dalam hal penganggaran, pengalokasian dan pengawasan/pengendalian agar lebih terarah. Hal lain yang tidak boleh dilupakan adalah adanya akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip pembiayaan dalam era otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang menganut prinsip kewenangan, kemandirian dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek biaya. Tuntutan akan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing, menuntut pembiayaan pendidikan yang makin tinggi
2. Krisis ekonomi yang berakibat menurunnya kemampuan pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikan, diberlakukannya otonomi daerah serta penerapan MPMBS merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan kejuruan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Kondisi tersebut menuntut lembaga pendidikan kejuruan lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam menggali dan mengalokasikan berbagai sumberdaya dan sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.
3. Sumbangan pembiayaan pendidikan dari masyarakat termasuk dunia usaha/industri yang mampu digali oleh lembaga pendidikan menengah kejuruan masih rendah. SMK perlu meningkatkan kemampuannya dalam menggali dana dari masyarakat termasuk dunia usaha/industri dengan berbagai cara dan pendekatan.
4. *Production Based Education*, optimalisasi unit produksi dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan merupakan upaya yang perlu ditempuh SMK dalam upaya menggali dan memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sumber yang beragam.

Saran

Dalam upaya meningkatkan kemampuan SMK dalam menggali dana bagi penyelenggaraan pendidikan dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan bagi SMK masih sangat bergantung pada pemerintah dan orangtua siswa. Diperlukan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk memberikan motivasi dan stimulan agar SMK mampu menggali dana “alternatif” secara optimal.
2. Kontribusi dana dari masyarakat, dunia usaha/industri serta pemanfaatan potensi (unit produksi) yang mampu digali SMK masih rendah. Oleh karena itu SMK harus lebih proaktif dalam menjalin kerjasama saling menguntungkan termasuk dalam hal pembiayaan.
3. Unit produksi yang telah terbentuk hendaknya ditingkatkan fungsinya dan dikelola secara professional dan memperhatikan aspek-aspek bisnis.

4. Upaya optimalisasi dan diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan harus diimbangi dengan efisiensi dalam penganggaran, pengalokasian dan pengawasan sesuai prinsip otonomi daerah dalam bidang pendidikan yang menyangkut kewenangan, kemandirian dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

- Abbas Ghozali. (2000a). Analisis biaya-manfaat SMU dan SMK. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 022. Tahun ke-5. Hal. 57 – 85.*
- Abbas Ghozali. (2000b). Pendidikan : Antara investasi manusia dan alat deskriminasi *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 023. Tahun ke-5. Hal. 57 – 85.*
- Balitbang Depdiknas. (2000). *Statistik persekolahan*. Jakarta: Statistik Pendidikan
- Boediono, Wafter W. Mc.Mahon Don Adam. (1992). *Education, economic and social development, second 25 years development plan and sixth year development plan, background paper and goals*. Jakarta: Pusat Informasi Balitbang Dikbud
- Dedi Supriyadi (2003). *Satuan Biaya Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Depdikbud. (2002). *Pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) melalui pendekatan pendidikan berbasis luas*. Jakarta: Depdiknas.
- Djauharis Rosul. (1997). Peningkatan peran serta industri dalam melaksanakan PSG, *Jurnal Kajian Dikbud No. 011 Tahun III. Hal 85 – 92.*
- Nanang Fatah. (2000). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Bandung: Rosda
- Sukamto. (1998). Orientasi dunia kerja dalam proses dan status akreditasi SMK. *Jurnal Kependidikan Edisi Khusus Dies Tahun XXXVIII. Hal. 109 –126.*
- Sukardi, dkk. (2004) *Pola Pembiayaan Siswa SMK Negeri dan Swasta di DIY*. Laporan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta.
- _____, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah
- _____, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah